

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Donald Teddy Evert, Khoidin, Suci Ivida Dewi Amrih, 2022, *Hukum Kenotariatan Prinsip Kepastian Hukum Keuatan Mengikat Akta In Originali*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris (MPN)*, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Kumalawati Ivo Dewi, Poesoko Herowati, Suci Ivida Dewi Amrih, 2021, *Hukum Kenotariatan Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara*, Laksbang Pustaka, Yogyakarta.

Kie Thong Tan, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Kie Thong Than, 2000, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2011, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, UI Press, Cetakan Ketiga, Jakarta.

Notodisoerjo Soegondo R., 1993, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, CV Rajawali, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sjaifurrahman dan Ajie Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.

Sumardjono, Maria, S.W, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta

Tobing. Lumban G.H.S, 1998 (II), *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

_____, 1980, (I), *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Perubahan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei

2015.

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa
Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

C. TESIS

Santiaji, Dera Reswara, “Peran Majelis Pengawas Terhadap Ketaatan Notaris Dalam Upaya Penegakan Kode Etik”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Islam, Bandung, 2020.

Saputra, Della Ryan, “Peran Majelis Pengawas Daerah Dan Dewan Kehormatan Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris Yang Terbukti Memiliki Dua Kantor Dalam Satu Wilayah Kerja Notaris Di Kabupaten Cilacap”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

D. INTERNET

<https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/5616-terungkap-deretan-pelanggaran-Notaris-ada-yang-sudah-mati-bisa-bikin-akta>, diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pada pukul 16.00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jika-ada-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja--lakukan-ini-cl881/>, diakses pada tanggal 6 September 2023 pada pukul 22.18 WIB.